

Manajemen Logistik Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros

Madani Rahmatullah^{1*}, Abdul Mahsyar², Samsir Rahim³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to discuss the implementation of non-medical logistics management at the Salewangan Maros General Hospital which discussed the planning function, procurement function, care function and rescue function. This study used qualitative research with the type descriptive research that did not test certain hypotheses. It was to find out the logistics management. The results showed that planning function indicators were categorized as good because they were structured. Logistics goods procurement, the implementation of the procurement function had not been well categorized, according to the nature of the procurement was already using direct procurement. Then in the goods maintenance function was effective but did not damage goods that were not suitable for use, the change depends on the procurement process itself. The implementation of the appointment function indicator could not be categorized as good or bad this year, but there had not been a removal of goods.

Keywords: *management, logistics, logistics management functions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari fungsi manajemen logistik Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros yang berfokus pada empat fungsi yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengadaan, fungsi perawatan dan fungsi penghapusan. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai manajemen logistik. Adapun hasil penelitian dari indikator fungsi perencanaan sudah dikategorikan baik karena sudah terstruktur. Pengadaan barang logistik, pelaksanaan fungsi pengadaan belum dikategorikan baik, meskipun pada hakikatnya pada pengadaan barang sudah menggunakan pengadaan langsung. kemudian dalam fungsi perawatan barang sudah efektif namun tidak merusak barang yang sudah tidak layak pakai pergantiannya tergantung dari proses pengadaan barang itu sendiri. Manajemen logistik pada pelaksanaan indikator fungsi penghapusan belum dapat dikategorikan baik atau tidak baik karena pada tahun ini belum terjadi penghapusan barang.

Kata Kunci: manajemen, logistik, fungsi manajemen logistik

* madani1@gmail.com

PENDAHULUAN

Manajemen logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik mulai dari pengadaan, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam organisasi publik, manajemen logistik sangat erat hubungannya dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah. Proses ini tidak hanya berputar disekitar aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan suatu instansi pemerintah, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas manajemen logistik sangat menyangkut kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah.

Peran logistik dalam organisasi pemerintah, meliputi logistik internal, yaitu kebutuhan barang untuk beroperasinya organisasi pemerintah dan melayani logistik eksternal, yaitu melayani logistik untuk masyarakat, perusahaan, maupun institusi lainnya. Pelaksanaan tugas pemerintah bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan logistik eksternal, pemerintah tidak bertindak sebagai pelaku logistik secara langsung, namun pemerintah

bertindak melayani dalam hal kebijakan, informasi, dukungan fasilitas umum, seperti jalan, transportasi, terminal, pelabuhan, dan pasar. Logistik yang dikelola dengan tepat, baik secara kuantitas, kualitas maupun waktu dan biaya, dapat menjadi aset utama organisasi publik, yaitu sebagai sumber pendapatan yang strategis dan berperan mendorong kegiatan ekonomi.

Secara umum, kegiatan logistik merupakan penyampaian dan pengiriman barang atau material dengan jumlah tertentu dan waktu yang tepat ke lokasi tertentu dengan biaya seminim mungkin. Melalui proses logistik, material dapat sampai ke tempat produksi melalui saluran distribusi sehingga mampu memberikan kegunaan (*utility*) yang baik. Dengan demikian, sistem logistik merupakan sumber penciptaan nilai tambah baru (*creation of the new value added*), yaitu dalam mempermudah dan memperlancar aliran barang dan jasa sehingga menjadi suatu pelayanan terpadu yang selanjutnya merupakan sumber-sumber pendapatan. Semakin besar suatu organisasi, maka semakin rumit manajemen logistik yang harus dilakukan karena makin beraneka ragamnya bahan, barang, alat, dan sarana yang ditangani.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional pasal 1 ayat (1) menetapkan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional, ayat (2) menetapkan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta koordinasi kebijakan dan pengembangan sistem logistik nasional. Kemudian pasal 2 menetapkan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait pengembangan sistem logistik nasional di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategi masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan.

Manajemen logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros merupakan salah satu aspek yang penting. Ketersediaan logistik menjadi

tuntutan pelayanan yang maksimal. Manajemen logistik pada kantortersebut meliputi tahap-tahap yaitu perencanaan, pengadaan, perawatan, dan penghapusan yang saling terkait satu sama lain, sehingga harus terkoordinasi dengan baik agar masing-masing dapat berfungsi secara optimal. Ketidakterkaitan antara masing-masing tahap akan mengakibatkan tidak efesienya sistem suplai logistik yang ada. Dari ulasan tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros memerlukan proses perencanaan yang terstruktur dengan baik, perencanaan merupakan proses awal dari pengelolaan manajemen logistik yang selanjutnya mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan logistik di rumah sakit tersebut, hal ini sangat penting dilakukan oleh pihak RSUD Salewangan Maros sebagai pihak yang selalu memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat luas maka perlu perencanaan yang baik agar hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pelayanan dapat terpenuhi dengan baik.

Pengelolaan logistik yang baik dapat memberi pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan, maka dari itu, pengelolaan logistik perlu diawasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan

operasionalnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk hal pelaksanaan pengelolaan logistik yang masih belum optimal. Apabila Perencanaan dan pelaksanaan manajemen logistik tidak mampu dioptimalkan, maka untuk mencapai titik keberhasilan akan sulit. Kegagalan manajemen logistik akan menurunkan kualitas pelayanan sehingga kepuasan masyarakat juga akan menurun.

RSUD Salewangan Maros tidak pernah lepas dari kegiatan pelayanan, mulai dari pelayanan pasien rawat inap, pasien rawat jalan pada poliklinik, bpjs kesehatan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang datang untuk menerima pelayanan setiap harinya adalah jumlah yang tidak sedikit, maka dari itu pengadaan logistik sangat berperan penting dalam membantu aktivitas pelayanan tersebut untuk mencapai efektifitas kegiatan logistik dan terpenuhinya kepuasan masyarakat. Terpenuhinya kepuasan masyarakat yang dilakukan pemerintah yaitu terpenuhinya keinginan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat dan efisien, pemerintah mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar akan tanggung jawab yang diembannya untuk melayani dan sebaliknya hanya untuk dilayani. Aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk

tidak berorientasi kepada kepuasan masyarakat, bahkan kepuasan masyarakatlah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan.

Masyarakat sadar bahwa kondisi aparaturnegara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintah yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan yang tidak maksimal. Perawatan/ pemeliharaan, di RSUD Salewangan Maros dalam melaksanakan fungsi tersebut tidak maksimal seperti contohnya pada ruangan pasien rawat inap memiliki Ac yang tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit sedangkan dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan, mulai dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan, kemampuan petugas pelayanan,

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.

Berdasarkan survey awal melalaui wawancara dengan bagian sarana dan prasarana bahwa dalam proses pengadaan barang memerlukan waktu yang digunakan setiap 6 bulan sekali. Namun terkadang dalam pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan hasil penelitian Ria Ardianti (2014) mengemukakan bahwa masalah perencanaan logistik rumah sakit juga terjadi di RSUD Kota Depok bahwa “masalah yang pada proses perencanaan logistik gudang penyimpanan tidak di ikutsertakan dalam proses perencanaan maka terjadilah barang yang masih tersedia diadakan sedangkan barang yang hampir habis malah tidak diadakan”.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang tidak pernah lepas dari aktivitas pelayanan, maka perlu adanya perbaikan dalam manajemen logistik. Upaya perbaikan harus dioptimalkan untuk mengatasi masalah yang ada. Perlu adanya pengelolaan logistik yang benar dan akurat sebagai

upaya memenuhi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Mulai dari perencanaan yang harus terstruktur, penggunaan anggaran yang harus jelas, pengadaan barang yang tepat waktu, kemudian penghapusan juga harus diperhatikan, karena penghapusan suatu barang dengan tepat menjadi bukti pengelolaan logistik yang optimal. Ketika pengelolaan manajemen logistik ini semuanya berjalan secara akurat, maka akan memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan. Berdasarkan pembahasan di atas penulis tertarik melakukan kajian untuk mencari tahu manajemen logistik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros.

Menurut Burhanudin dalam Anwar (2015: 1), manajemen adalah kegiatan yang menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan ilmu, kiat, seni dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan

bagaimana orang bekerjasama (Gulick dalam Satori, 2006:10). Dikatakan sebagai kiat, menurut Follett, karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesionalnya dituntun oleh suatu kode etik. Sifat khusus manajemen adalah integrasi dan penerapan ilmu serta pendekatan analisis yang dikembangkan oleh banyak disiplin ilmu.

Menurut Gulick dalam Satori (2006: 10), seorang Ahli Administrasi Publik Amerika mengemukakan bahwa manajemen menjadi suatu ilmu jika teori-teorinya mampu menuntun manajer dengan kejelasan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu, memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakanya. Kualitas pimpinan yang penuh energik adalah pemecahan masalah dari pengharapan, mutu keputusan yang tepat yang diambil oleh manajer dalam mengubah input melalui proses sehingga menjadi output yang berkualitas dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat pada umumnya menganggap logistik hanyalah bagian dari proses pengantaran barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Logistik pada

hakikatnya tidak hanya dapat diartikan sebagai proses perpindahan barang atau pengantaran barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam manajemen perusahaan, logistik berperan penting dalam proses produksi dan pemasaran produk hasil produksi, sehingga produk yang diproduksi dapat sampai ke tangan konsumen.

Logistik tidak hanya terikat pada usaha manufaktur saja, tetapi terkait pula dengan seluruh organisasi termasuk pemerintah, seperti rumah sakit, sekolah, organisasi jasa, bank, pengecer dan organisasi jasa finansial. Logistik bersifat bebas terhadap alam, manusia, finansial maupun sumber informasi untuk input. Penyalur menyediakan bahan baku yang diatur oleh logistik dalam bentuk bahan baku, persediaan dalam proses dan barang jadi.

Logistik berasal dari kata logis yang berarti rasional dan tikos yang berarti berpikir sehingga logistik berarti berpikir rasional dalam menjalankan kegiatan. Istilah logistik disebut juga dengan istilah logistik bisnis, manajemen agen, distribusi, logistik industri, manajemen logistik, manajemen material, sistem yang merespon cepat, manajemen rantai pasokandan manajemen pasokan. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya sama dan

saling berhubungan dengan manajemen aliran barang dari titik awal hingga ke titik konsumen, dan dalam beberapa kasus sampai ke titik disposal.

Menurut Bowersox dalam Kusumastuti (2014: 3), logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang dari supplier kepada perusahaan dan kepada pelanggan. Ciri utama kegiatan logistik adalah keterpaduan berbagai dimensi dan tuntutan terhadap pemindahan (*movement*) dan penyimpanan (*storage*) yang strategis. Manajemen logistik merupakan hubungan yang sederhana antara faktor-faktor yang saling bebas, yaitu pembuatan (yang terdiri dari penjadwalan utama, penjadwalan produksi, pengaturan material dan produksi); pengiriman (yang berhubungan dengan perancangan lokasi, pemindahan material, pengangkutan dan penyaluran barang jadi); serta penjadwalan (berkaitan dengan peramalan, pelayanan pelanggan, pelayanan pesanan, dan pengiriman), menurut Kallock dalam Kusumastuti (2014: 3).

Salah satu pakar juga berpendapat mengenai defenisi logistik, yaitu Ratliff dan Nulty dalam Kusumastuti (2014: 4), mengemukakan bahwa logistik adalah *the process of planning, implementing*

and controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finish goods and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer needs. The collection and delivering supply chain commodities.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik mulai dari pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan November hingga Januari 2020. Adapun yang menjadi penentuan lokasi penelitian adalah RSUD Salewangan Maros.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah penelitian deskriptif yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai manajemen logistik.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Subag. Perencanaan RSUD Salewangan maros, Subag. Keuangan dan pegawai

yang melakukan Pengurusan Barang. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dengan para informan untuk memperoleh data dengan menggunakan daftar yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dan diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, melalui proses studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, dokumen yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSUD Salewangan Kabupaten Maros merupakan satu-satunya rumahsakit pemerintah di Kabupaten Maros yang dibangun pada tahun 1982 dan mulai dioperasikan pada bulan agustus 1983. Pada waktu itu RSUD Maros merupakan rumah sakit tipe D yang secara teknis administrasi maupun secara teknik operasional merupakan

UPTD yang bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. RSUD Kabupaten Maros kemudian berubah namamenjadi RSUD Salewangan Kabupaten Maros berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor 3721/SKPT/445/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1988. Selanjutnya pada tahun 1999 RSUD Salewangan Kabupaten Maros dinaikkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor 1228/MENKES/SK/X/1997.

Pengelolaan rumah sakit didasarkan pada peraturan daerah nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kelas C Dati II Maros. Seiring dengan perkembangan perumahsakit dan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat maka pada tahun 2001 RSUD Salewangan Maros mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja menjadi Badan Pengelolaan RSUD Salewangan Kabupaten Maros sesuai dengan peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja badan pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Maros. Berdasarkan Perda tersebut Rumah Sakit Salewangan tidak lagi menjadi UPTD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tetapi

bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui sekretaris daerah serta merupakan rumah sakit rujukan dari beberapapuskesmas yang berada di wilayah kabupaten Maros. Pada tanggal 12 November 2009, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : YM.01.10/III/4688/09, telah berhasil memperoleh sertifikat akreditasi penuh tingkat dasar oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk lima (5) jenis pelayanan antara lain : pelayanan administrasi, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan pelayanan rekam medis.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti akan membahas data-data yang diperoleh, dikaitkan dengan kajian kepustakaan atau referensi dalam penelitian ini. Berikut akan dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.

Manajemen logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros masih tergolong belum optimal meskipun terdapat beberapa alasan-alasan mengenai hal tersebut. Keempat fungsi manajemen logistik yang menjadi fokus kajian peneliti pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros mulai dari fungsi

perencanaan, pengadaan, perawatan dan yang terakhir adalah fungsi penghapusan.

Perencanaan Logistik

Perencanaan logistik pada RSUD Salewangan Maros dimulai dengan rencana awal yaitu menyusun RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit), RKBU dibuat atau disusun satu tahun sebelum pengadaan adalah bukti nyata bahwa sebelum melakukan pengadaan perlu melakukan perencanaan sebaik mungkin. Penyusunan RKBU tidak serta merta menuliskan barang, namun terlebih dahulu melakukan survei mengenai barang yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan pegawai. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Alder (Rustiadi, 2008: 339) bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Perencanaan merupakan dasar aktifitas manajemen yang lain. Dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan proses analisis, pemikiran, penelitian dan perhitungan dalam upaya memenuhi

kebutuhan-kebutuhan logistik. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perencanaan logistik ini sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Aturan-aturan mengenai perencanaan logistik terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat pada pasal 1 ayat (8), pasal 9 ayat (1) dan (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdapat pada pasal 1 ayat (12), dan pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengadaan barang logistik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. RKBU dibuat atau disusun satu tahun sebelum pengadaan adalah bukti nyata bahwa sebelum melakukan pengadaan perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Alur perencanaan yang jelas, penyusunan RKBU tidak serta merta menuliskan barang, namun terlebih dahulu melakukan survei mengenai barang yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan pegawai.

Kemudian pengadaan barang sesuai dengan RKBU adalah tanggung jawab bagian keuangan dengan mempertimbangkan anggaran untuk pengadaan barang.

Pengadaan Logistik

Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan didalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan (dengan peramalan yang baik) maupun penganggaran. Didalam pengadaan dilakukan proses pelaksanaan rencana pengadaan dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran. Pelaksanaan dari fungsi pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian, pembuatan, penukaran ataupun penerimaan sumbangan.

Di dalam hal pengadaan RSUD Salewangan Maros menggunakan tiga metode yaitu pengadaan langsung, menggunakan e-katalog maupun tender. Namun untuk sekarang, pengadaan langsung adalah metode yang yang digunakan dalam hal pengadaan dengan alasan bahwa pengadaan langsung lebih mudah dan terjamin, di dalam pengadaan di RSUD Salewangan Maros sangat memperhatikan kualitas/mutu suatu barang dengan melihat merk/type.

Kegiatan pengadaan merupakan aktifitas yang paling menentukan dalam rangkaian manajemen logistik. Melalui proses pengadaan inilah unit logistik dapat menunjukkan separuh dari kinerjanya, karena jika pengadaan berhasil ini berarti telah ada barang-barang yang dimiliki oleh organisasi dan siap didistribusikan dan digunakan oleh unit-unit kerja yang membutuhkan. Salah satu hal yang penting dalam pengadaan barang adalah menyangkut masalah kualitas/ mutu suatu barang. Unit logistik tidak boleh mengadakan barang yang asal-asalan. Akibatnya akan fatal jika unit logistik mengadakan barang-barang yang tidak berkualitas. Yang dimaksud dengan kualitas barang disini adalah adanya kecocokan antara produk dengan kegunaannya.

Masalah lain yang muncul pada pengadaan logistik tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian adalah adanya keterlambatan pengadaan barang yang bisa memakan waktu 2 minggu, masalah berikutnya adalah layanan purna jual atau garansi dari barang yang mengalami kerusakan susah untuk di kalim. Berdasarkan data yang diperoleh, membuktikan bahwa dalam pengadaan barang di RSUD Salewangan Maros masih belum efektif, meskipun sudah menggunakan

pengadaan langsung dan sudah terjamin keamanannya tapi masih saja terjadi kerusakan barang ketika sudah sampai pada tempat tujuan. Aturan-aturan mengenai pengadaan barang dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat pada pasal 12, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan bukti analisis data, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekurangan dan kelebihan barang yang diperdakan pada tahun 2018 adalah mengenai masalah penganggran, kekurangan barang disebabkan karena kurangnya anggaran, kemudian untuk kelebihan barang dikarenakan dalam jangka satutahun terjadi peningkatan kebutuhan barang sehingga dalam pengadaan terjadi kenaikan atau kelebihan barang. Masalah yang akan ditimbulkan akibat dari tidak terealisasinya RKBU adalah tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD itu sendiri, masalah ini juga diakibatkan karena adanya pengelolaan logistik yang tidak efektif.

Perawatan Logistik

Perawatan/Pemeliharaan logistik adalah proses peremajaan barang yang sudah rusak atau masih bagus untuk dilakukan perbaikan dan pengecekan kondisi barang. Perawatan yang dilakukan di RSUD Salewangan Maros sudah menjadi kegiatan rutin setiap bulannya namun yang menjadi kendala ketika barang sudah tidak bisa di perbaiki maka harus dilakukan pergantian barang sedangkan barang yang akan menjadi pengganti belum diadakan pengadaan barang karena pengadaan barang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal inilah menjadi penghambat atau kurang maksimalnya fasilitas pelayanan yang ada di RSUD asalewangan maros.

Penghapusan Logistik

Penghapusan barang adalah kegiatan untuk menghapuskan barang/alat perlengkapan, dengan alasan: Hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan barang, yaitu meliputi:

Pada tahun 2018 tidak terjadi penghapusan, penghapusan terakhir kali dilakukan pada RSUD Salewangan Maros yaitu pada tahun 2014. Meskipun

penghapusan tidak dilakukan namun berdasarkan penelitian untuk mengetahui tata cara penghapusan pada kantor tersebut pada tahun 2014 maka peneliti melakukan wawancara, hasil wawancara tersebut adalah penghapusan barang yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penghapusan tidak semerta-merta dilakukan namun ada prosedur yang harus ditaati.

Penghapusan pada Rumah sakit Umum daerah salewangan maros dilakukan 5 tahun setelah pengadaan barang. Namun pada dasarnya ketika barang itu sudah mencapai umurnya dan masih layak untuk digunakan, maka tidak akan dilakukan penghapusan, begitu pula sebaliknya, ketika barang yang belum mencapai umurnya namun sudah rusak atau tidak dapat digunakan, maka sebelum melakukan penghapusan dilakukan kroscek terlebih dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut masih bisa diperbaiki atau tidak, ketika barang itu masih bisa diperbaiki dan masih layak untuk digunakan maka barang tersebut tidak akan dihapuskan. Penghapusan dilakukan dengan mempertimbangkan umur ekonomis dan kondisi barang, ketika barang sudah dihapuskan berarti barang tersebut sudah tidak terdaftar pada daftar inventaris barang. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 bahwa penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan-tindakan penghapusan barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah. Penghapusan atau pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 77-83, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa perawatan barang sudah rutin dilakukan setiap bulannya dan sudah dimaksimalkan untuk barang yang masih bisa terpakai dengan melakukan proses peremajaan barang atau rekondisi, namun yang terjadi apabila barang tersebut sudah tidak bisa terpakai maka akan dilakukan pergantian, dalam pergantian tersebut memerlukan waktu yang cukup lama tergantung dari pengadaan yang dilakukan setiap 6 bulan. Hal inilah yang menjadi masalah ketika barang tersebut sudah harus diganti namun belum ada pengadaan barang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Manajemen Logistik Pada Rumah sakit Umum Daerah Salewangan Maros maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen logistik yang menjadi fokus penelitian yang meliputi: a) Fungsi perencanaan, perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros sudah dikategorikan baik, karena perencanaan kebutuhan barang terlebih dahulu dubuatkan Rencana Kebutuhan Unit Barang (RKBU) yang mampu mempermudah untuk mengetahui barang yang ingin diperadakan, b) fungsi pengadaan, pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah salewangan Maros belum bisa dikategoriakn baik, karena pengadaan barang tidak terealisasikan dengan baik sesuai dengan RKBU, c) fungsi perawatan, perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros sudah dilakukan dengan baik namun bergantung pada pengadaan barang yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. d) fungsi penghapusan, penghapusan pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros tahun 2018 belum dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sudirman. 2015. *Management of Student Development*. Riau : Yayasan Indragiri.
- Arifin, Imamul dan Giana Hadi w. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta : PT. Setia Purna.
- Basu, Swasta. 1990. *Manajemen Pemasaran Materi*. Yogyakarta : Liberty
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Dwiantara, Lukas dan Rumsari Hadi Sumarto. 2004. *Manajemen Logistik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- J. Supranto. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kusumastuti, Dyah. 2013. *Manajemen Logistik Organisasi Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Mustafa, Bachsan. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*. Bekasi : PT Citra Aditya Bakti.
- Ratminto dan Atik Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Siagian P, Sondang. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara